

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan (BPK). Selain itu tujuan laporan keuangan juga mempunyai manfaat, manfaat laporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk memberikan informasi keuangan sebagai perencanaan dan penganggaran, memberikan informasi dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Dalam laporan keuangan sumber daya manusia harus mencapai tata kelola keuangan yang baik sebagai keterandalan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Desmiyawati (2019). keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, informasi dikatakan andal apabila dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dalam kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dalam penyusunan laporan keuangan khususnya dalam pemerintahan, sumber daya manusia harus lebih profesional dan berkualitas agar laporan dapat disusun dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian dirubah untuk kedua kalinya menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan keuangan. (Indah Satria, 2019).

Keuangan negara/daerah yang dimaksudkan sebagai uang rakyat yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan negara/daerah yang baik sangat penting agar uang negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan (Nasution, 2021) beberapa peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa keterandalan laporan keuangan itu di pengaruhi oleh beberapa faktor terutama variabel penggunaan aplikasi SIPD, kualitas laporan keuangan (Devia Yulianda, et.al, 2022) Selanjutnya kualitas laporan keuangan, hingga kepada pemanfaatan teknologi dan akuntabilitas kinerja mempengaruhi keterandalan laporan keuangan (Iin Nuraeni, et.al, 2023)

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik. Akuntabilitas bisa dideteksi dengan besarnya kemungkinan ketika menggunakan sebuah aplikasi, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu sistem pendokumentasian, pengelolaan data dan perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada Masyarakat dan sebagai dokumen pengambilan Keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah sebaik-baiknya.

Program SIPD dibagi menjadi beberapa fase, memungkinkan pengguna di tingkat terendah, desa untuk mengelola data ide atau keluhan masyarakat, proposal

memuat data yang dimasukkan untuk menjadi usulan prioritas. Setiap wilayah juga mengelola data usulan untuk diteruskan ke tingkat kabupaten, ini akan dipindahkan ke tingkat yang lebih tinggi, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai manajer perencanaan (BAPPEDA) (Nasution, 2021)

SIPD sebagai suatu sistem yang salah satunya untuk instansi pemerintah yang dituntut mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik yaitu dengan cara mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dalam upaya mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik selaku unit perencanaan diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Dalam penyusunan perencanaan daerah yang baik harus didukung dengan data yang akurat beserta informasi yang relevan yang kondisi dan kebutuhan sebagai tuntutan masyarakat. (Amri, et.al, 2022)

Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021) Dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa fungsi laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Fungsi laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan sangat berfungsi pada bagian keuangan, hal ini tentunya mampu dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia. Ketika laporan keuangan akan diinterpretasikan dalam suatu sistem informasi laporan hasil input data, sumber daya manusia memiliki peranan besar dalam memastikan laporan secara internal (Eka Satria Wibawa, 2020)

Pengendalian internal dalam laporan keuangan (ICFR) adalah proses yang membantu perusahaan mengelola risiko keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang akurat. ICFR mencakup kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh karyawan dalam menangani keuangan. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan bertujuan untuk mencegah atau mendeteksi penyalagunaan aset atau sumber daya, memastikan informasi akuntansi akurat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam sistem laporan keuangan pada aset negara. Sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, dalam sistem pengendalian internal yang baik dapat memperlancar proses dan alur kerja dari sumber daya manusia sehingga terbentuknya keterandalan dalam laporan keuangan tersebut.

Fenomena yang terjadi disetiap tahunnya, badan pengelolaan keuangan daerah mulai menggunakan SIPD menggantikan aplikasi SIMDA yang sebelumnya telah digunakan. Pada Pemprov Sumatera Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Anggaran melaksanakan pelatihan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pengelolaan laporan keuangan melalui SIPD yang bisa mewujudkan peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov dengan memastikan penyusunan APBD 2025 mendatang (Observasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2024)

Kenyataannya pengelolaan dan penataan keuangan menggunakan SIPD sebagai proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan tidak lagi secara manual dan memastikan pengelolaan keuangan memberikan laporan wajib agar tidak mendapatkan permasalahan ketika sistem data mengalami gangguan pada sistem laporan, seperti pada tahun lalu belum adanya pencapaian Opini WTP, perangkat daerah mengevaluasi dan monitoring belum mengetahui keterandalan sistem dan fungsi laporan keuangan sebagai informasi yang diterima. Jika diberikan pilihan bagian pengelolaan keuangan tidak akan memilih menggunakan SIPD, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena SIPD wajib untuk digunakan pemda dalam tata kelola keuangan pembangunan. Kewajiban untuk mengimplementasi SIPD tersebut merupakan bagian dari amanat UU No. 23/2024 Pasal 391, yang menyebutkan informasi keuangan dan pembangunan daerah disajikan dalam suatu sistem pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan oleh BPK sebagai wujud dari akuntabilitas, transparansi dan tanggungjawab atas pelaksanaan keterandalan

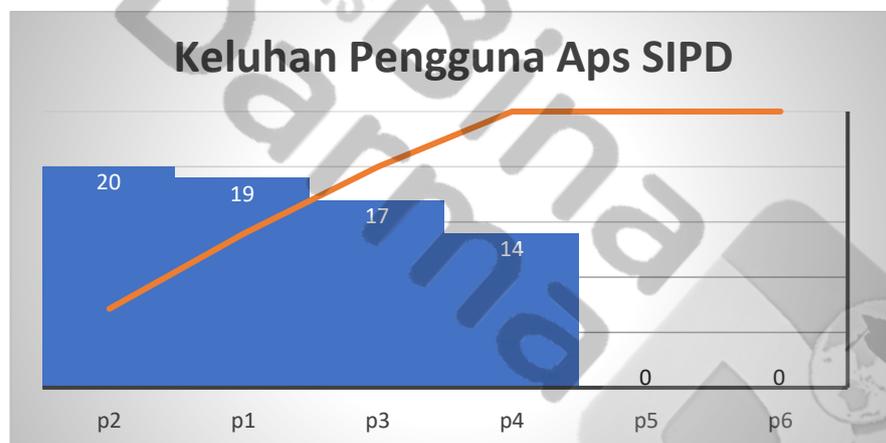
laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Observasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2024)

Pada Pemerintahan daerah Pemprov Sumatera Selatan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai upaya pelatihan Kementerian dalam Negeri pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengasesmen kebijakan penganggaran dalam implementasi SIPD, yang digunakan adalah sipd.kemendagri.go.id data yang diinput ke dalam aplikasi SIPD. Baik pusat maupun daerah harus memastikan adanya risiko keterandalan laporan keuangan dilihat dari ketersediaan data yang terkadang tidak memadai, serta kesulitan mengidentifikasi akun resiprokal. Pada dasarnya laporan keuangan sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari laporan keuangan agar memenuhi kualitas laporan keuangan negara yang bisa dipertanggungjawabkan dengan bijak sebagai perkembangan sektor publik di Indonesia ditentukan dalam perundang-undangan sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur-Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dina Fitriyani (2024) yang membenarkan ketika hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketika ingin mencapai keterandalan laporan keuangan hal yang paling penting dilakukan adalah memastikan akuntabilitas agar dapat dilakukan pengendalian secara internal dari sumber daya manusia dalam memastikan laporan keuangan. Sedangkan yang diteliti oleh Siti Chodijah (2021) menunjukkan secara persial menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hal ini dibuktikan dari uji persial (uji t).

Berdasarkan hasil observasi yang dilanjutkan kembali pada tanggal 2 Desember 2024 melalui penyebaran kuesioner sementara, peneliti menemukan adanya keluhan atau hambatan saat menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 1.1 Hasil persentase keluhan penggunaan aplikasi SIPD
Sumber : Data diolah (2024)

Pada gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 20 pegawai mencapai persentase 64,5% di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan Sangat Setuju (SS) saat menggunakan aplikasi SIPD sering terjadi error karena *server* tidak mendukung, hal ini terjadi bisa disebabkan oleh jaringan internet yang kurang memadai dan operator dalam mengoperasikan aplikasi SIPD belum memahami sepenuhnya, yang mana dalam hal ini dapat memicu adanya risiko keterandalan laporan keuangan kesulitan mengidentifikasi akun *resiprokal* atau akuntansi pemerintah dalam proses mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan dalam sektor pemerintahan. Sedangkan tujuan menggunakan aplikasi

SIPD adalah untuk memastikan transparansi, akurasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Karena akuntabilitas laporan keuangan pemerintah merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar dapat mengatasi berbagai risiko keterandalan laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Observasi di Pemprov Sumatera Selatan, 2 Desember 2024)

Permasalahan yang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam pengelolaan laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adanya sistem penerimaan anggaran secara cash dan dibantu dengan penggunaan kartu kredit dengan nominal keperluan mencapai limit Rp. 100.000.000 dan untuk Rp. 40.000.000 bisa dilakukan secara cash. Hal ini bisa mempersulit Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan hingga kepada verifikator keuangan SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memastikan laporan keuangan dapat dilakukan pengendalian internal tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sehingga akuntabilitas kinerja intansi sangat dibutuhkan guna memastikan peningkatan hasil laporan keuangan menjadi keterandalan (Observasi di Pemprov Sumatera Selatan, 2 Desember 2024)

Untuk mendapatkan solusi penggunaan aplikasi SIPD tersebut Bagian Pengelolaan Laporan Keuangan berupaya melakukan beberapa tahapan seperti mengkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri) untuk Perbaikan sistem, atau bisa berkoordinasi dengan Diskominfo untuk membuat sistem atau hanya menunggu sampai *server* kembali bisa digunakan dan menginput ulang data-data yang akan dikelola melalui aplikasi SIPD tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sri Dewi Anggadini, Vira Mutiara, Subekti & Egi Fahrana, 2021) berjudul tentang Keterandalan Laporan Keuangan: Dampak dari Kualitas SDM dan Teknologi Informasi. Kualitas sumber daya manusia sudah baik namun perlu diperhatikan karena tingkat kejujuran dalam penyajian laporan keuangan belum mencapai kondisi optimal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dari itu peneliti memiliki alasan untuk memperkuat melanjutkan studi agar semakin akurat hingga tuntas, sehingga peneliti menentukan judul tentang **“Pengaruh Aplikasi SIPD, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal terhadap Keterandalan Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Sumsel)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pengaruh Aplikasi SIPD terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana pengaruh Pengendalian Internal terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ?

4. Apakah Aplikasi SIPD berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai variabel Moderating ?
5. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai variabel Moderating ?
6. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Sebagai Variabel Moderating ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Aplikasi SIPD terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk menganalisis pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengendalian Internal terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
4. Untuk menganalisis Aplikasi SIPD berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai variabel Moderating
5. Untuk menganalisis Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai variabel Moderating

6. Untuk menganalisis Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai variabel Moderating

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya dalam menilai keterandalan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi instansi terkait dalam meningkatkan Fungsi Bagian Keuangan pada setiap SKPD dalam memaksimalkan keterandalan laporan keuangan.

- c. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema dan topik yang sejenis.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dan pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun susunan dan struktur penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab dan akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang meliputi teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), Aplikasi Keuangan SIPD, kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, keterandalan laporan keuangan. Kemudian adanya penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain dan jadwal penelitian, data penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memecahkan rumusan masalah untuk mengetahui pengaruh Aplikasi SIPD, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel Moderating.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan membahas kesimpulan akhir dari penyelesaian penelitian yang telah diperoleh dan dianalisis seperti penutup dan saran.

